

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**Jonetta Triyanti. D, H.Eddy Soegiarto K, Imam Nazarudin Latif**

*Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

Email : [ethaedi5@gmail.com](mailto:ethaedi5@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rasio Efektifitas dan Tingkat Pertumbuhan (*Growth* ). Data diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bahwa perkembangan pendapatan asli daerah Kota Samarinda dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 – 2015 cenderung meningkat. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tertinggi yaitu pada tahun 2012 dengan presentase 70% sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tertinggi yaitu pada tahun 2011 dengan persentase 27%

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

Berlakunya kebijakan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, system pemerintahan mengalami perubahan mendasar. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter dan fiscal menjadi wewenang untuk pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten / kota mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber – sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi – potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik – baiknya, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber – sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sumber – sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah menurut Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain – lain pendapatan yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah dapat mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebagai konsekuensi logis menjadi Daerah Otonom, maka pemerintah Kota Samarinda berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber – sumber keuangan yang ada. Salah satu sumber keuangan daerah yang diatur dalam Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), khususnya sektor pajak daerah dan retribusi.

Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatnya PADnya. Kemandirian Pemkab / Pemkot dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab / Pemkot. Semakin besar pajak dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain – lain.

Kota Samarinda merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki beraneka ragam sumber jasa yang dapat dikenakan retribusi. Mulai dari sektor pariwisata sampai dengan jasa – jasa yang disediakan oleh pihak swasta. Dari retribusi inilah yang akan menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolok ukur financial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan

mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah.

Melihat pentingnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah di masa yang akan datang maka dilakukanlah penelitian untuk melihat seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber dana bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Keberhasilan dari usaha ini tidak hanya terletak pada pihak pemerintah daerah selaku pemegang hak untuk mengeluarkan kebijakan dan peraturan – peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi ini saja, tetapi harus didukung oleh peran serta masyarakat dan pihak swasta yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang telah dijelaskan pada latar belakang maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “ Apakah kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan Kota Samarinda”.

### **Dasar Teori**

- a. Akuntansi Sektor Publik  
Mardiasmo ( 2002 : 1 – 2 ) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan pemberlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam – macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi

dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu ( ekonomi, politik, hukum dan sosial ) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda – beda.

- b. Pendapatan Asli Daerah  
Menurut Undang – undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
- c. Unsur – unsur PAD.  
Menurut Undang – undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 : Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah ( PAD ) yang sah.
- d. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menurut Mulyanto ( 2002 : 25 ) kontribusi merupakan besarnya sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Akuntansi keuangan daerah memakai dasar akuntansi dan sistem pencatatan tertentu pada masa pra dan pasca reformasi. Dasar akuntansi adalah salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi karena asumsi tersebut berperan

untuk menentukan waktu pencatatan transaksi dilaksanakan. Hal ini dikenal dalam akuntansi keuangan daerah di masa pra reformasi.

Menurut Darise ( 2008 ) dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat, karena akuntansi keuangan daerah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Pertanggung jawaban ( *accpuntability ang stewardship* )
- b. Manajerial
- c. Pengawasan

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang terletak di Komplek Balaikota Jl. Kesuma Bangsa No. 86 Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

Metode ini dengan mengadakan penelitian secara langsung dalam hal wawancara terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, dengan penelitian kepustakaan ( *Library Research* ) untuk mengumpulkan data sekunder melalui laporan realisasi anggaran ( LRA ) yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tehnik Analisis :

1. Analisis Kontribusi menurut Dasril, Henry dan Hessel ( 2004 : 22 ) analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD.

**Kontribusi Pajak Daerah terhadap**

**Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) =**

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

**Kontribusi Retribusi Daerah terhadap**

**Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) =**

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

2. Rasio Efektifitas menurut Henry ( 2002 : 22 ) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan peraturan daerah berdasarkan potensi riil daerah.

**Efektifitas per jenis pajak daerah =**

$$\frac{\text{Realisasi per jenis Pajak Daerah}}{\text{Target per jenis Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

**Efektifitas per jenis Retribusi Daerah=**

$$\frac{\text{Realisasi per jenis Retribusi Daerah}}{\text{Target per jenis Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

3. Tingkat Pertumbuhan ( *Growth* ) menurut Halim (2004 :15)

**Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah ( Growth )**

$$= \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100 \%$$

**Tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah ( Growth )**

$$= \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100 \%$$

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Menganalisis kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kota Samarinda sebesar 75% di akhir tahun periode. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah periode tahun 2011 – 2015, maka dapat dilihat adanya naik dan turunnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda**

Tahun	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah Target PAD	X 100	%
2011	<u>Rp. 109.428.925.935.39</u> Rp. 182.560.000.000.00	X 100	60%
2012	<u>Rp. 159.865.253.302.66</u> Rp. 228.445.500.000.00	X 100	70%
2013	<u>Rp. 197.823372.365.07</u> Rp. 286.904.776.836.46	X 100	69%
2014	<u>Rp. 238.899.942.946.65</u> Rp. 577.555.670.510.00	X 100	41%
2015	<u>Rp. 244.079.216.597.34</u> Rp. 819.500.000.000.00	X 100	30%

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun anggaran 2011 realisasi pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup baik yaitu sebesar 60% tetapi belum melebihi target minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yaitu sebesar 75% pada akhir tahun anggaran, pada tahun anggaran 2012 kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 70%, pada tahun anggaran 2013 kontribusi yang diperoleh mengalami penurunan hanya mencapai 69% di tahun anggaran 2014 kontribusi hanya mencapai 41% dan pada tahun anggaran 2015 kontribusi penerimaan pajak daerah kembali mengalami penurunan hanya mencapai 30%.

**Tabel 5.2 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda**

Tahun	Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Realisasi Pajak Daerah Target PAD	X 100	%
2011	<u>Rp. 48.807.626.632.27</u> Rp. 182.560.000.000.00	X 100	27%
2012	<u>Rp. 56.926.879.684.68</u> Rp. 228.445.500.000.00	X 100	25%
2013	<u>Rp. 55.667.331.774.13</u> Rp. 286.904.776.836.46	X 100	19%
2014	<u>Rp. 66.907.583.372.00</u> Rp. 577.555.670.510.00	X 100	12%
2015	<u>Rp. 61.937.838.047.00</u> Rp. 819.500.000.000.00	X 100	8%

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun anggaran 2011 realisasi retribusi daerah memberikan kontribusi yang tidak terlalu baik yaitu sebesar 27%, di tahun anggaran 2012 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan hanya mencapai 25%, tahun 2013 kontribusi penerimaan retribusi daerah kembali mengalami penurunan hanya mencapai 19%, tahun anggaran 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya mencapai 12% dan pada

tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah belum memberikan hasil yang cukup baik hanya mencapai 8%.

**Tabel 5.3 Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah**

Tahun	Sumber	Target ( Rp )	Realisasi( Rp)	%
2011	Hotel	8.000.000.000.00	8.860.954.125.45	111
	Restoran	13.500.000.000.00	13.904.598.692.23	103
	Hiburan	5.560.000.000.00	5.882.959.797.24	106
	Reklame	3.650.000.000.00	3.030.219.024.50	83
	PPJ	32.550.000.000.00	36.485.441.391.80	112
	Parkir	2.500.000.000.00	2.589.446.148.00	104
	Air Tanah	45.000.000.00	-	-
	Sarang Walet	150.000.000.00	5.000.000.00	3
	Galian C	100.000.000.00	156.872.500.00	157
	PBB	-	-	-
	BPHTB	35.123.846.688.00	38.513.434.256.17	110
	<b>Jumlah</b>	<b>101.178.846.688.00</b>	<b>109.428.925.935.39</b>	<b>108</b>
2012	Hotel	9.500.000.000.00	11.060.312.599.18	116

	Restoran	14.500.000.000.00	16.405.922.435.80	113
	Hiburan	7.710.000.000.00	7.257.751.847.00	94
	Reklame	5.000.000.000.00	5.416.978.996.09	108
	PPJ	34.000.000.000.00	44.196.627.750.00	130
	Parkir	3.500.000.000.00	2.988.977.000.00	85
	Air Tanah	45.000.000.00	40.138.569.84	89
	Sarang Walet	250.000.000.00	-	-
	Galian C	350.000.000.00	430.873.899.00	123
	PBB	22.500.000.000.00	22.741.120.687.00	101
	BPHTB	35.000.000.000.00	49.326.549.518.75	139
	<b>Jumlah</b>	<b>132.810.000.000.00</b>	<b>159.865.253.302.66</b>	<b>120</b>
	2013	Hotel	13.008.002.500.00	13.364.380.346.40
Restoran		20.253.000.000.00	22.274.583.151.32	110
Hiburan		9.651.985.737.00	10.095.453.120.91	105
Reklame		6.429.990.000.00	6.495.666.709.46	101
PPJ		51.300.000.000.00	55.511.761.802.48	108
Parkir		4.000.000.000.00	3.277.615.250.00	82

	Air Tanah	45.000.000.00	46.197.412.86	103
	Sarang Walet	100.000.000.00	1.541.000.00	2
	Galian C	450.000.000.00	528.039.969.00	117
	PBB	27.500.000.000.00	27.774.101.069.74	101
	BPHTB	48.000.000.000.00	58.454.032.532.90	122
2014	Hotel	16.700.000.000.00	18.116.850.345.70	108
	Restoran	27.600.000.000.00	27.985.614.113.65	101
	Hiburan	13.550.000.000.00	14.960.249.448.95	110
	Reklame	6.765.000.000.00	6.926.570.722.43	102
	PPJ	66.000.000.000.00	69.209.084.416.22	105
	Parkir	5.275.000.000.00	4.725.276.023.00	90
	Air Tanah	45.000.000.00	45.747.204.76	102
	Sarang Walet	100.000.000.00	3.127.170.00	3
	Galian C	866.900.000.00	662.344.125.00	76
	PBB	30.000.000.000.00	37.812.061.637.00	126

	BPHTB	58.000.000.000.00	58.453.017.739.94	101
	<b>Jumlah</b>	<b>224.901.900.000.00</b>	<b>238.899.942.946.65</b>	<b>106</b>
2015	Hotel	20.000.000.000.00	20.631.994.524.72	103
	Restoran	32.000.000.000.00	34.178.845.016.61	107
	Hiburan	17.250.000.000.00	15.289.342.611.06	89
	Reklame	7.500.000.000.00	7.511.962.861.01	100
	PPJ	78.500.000.000.00	83.766.513.039.21	107
	Parkir	6.500.000.000.00	6.090.528.555.25	94
	Air Tanah	45.000.000.00	34.879.019.44	78
	Sarang Walet	50.000.000.00	7.048.600.00	15
	Galian C	1.000.000.000.00	117.105.250.00	12
	PBB	35.000.000.000.00	33.336.301.098.32	95
	BPHTB	60.000.000.000.00	43.114.336.021.72	72
	<b>Jumlah</b>	<b>257.845.000.000.00</b>	<b>244.079.216.597.34</b>	<b>95</b>

( Sumber : Data diolah, 2016 )

Dari data diatas tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 – 2015 cukup efektif, karena hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah mendekati angka 100%. Pada tahun anggaran 2011 – 2014 tingkat

efektifitasnya memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan yaitu diatas angka 100% tetapi pada tahun anggaran 2015 angka yang ditunjukkan hanya mencapai 95%.

**Tabel 5.4 Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah**

Tahun	Sumber	Target ( Rp )	Realisasi( Rp)	%
2011	Jasa Umum	16.162.000.000.00	17.194.318.807.00	109
	Jasa Usaha	10.584.000.000.00	10.656.090.785.00	101
	Perizinan Tertentu	21.105.000.000.00	20.957.217.040.13	99
	<b>Jumlah</b>	<b>47.851.000.000.00</b>	<b>48.807.626.632.27</b>	<b>102</b>
2012	Jasa Umum	18.943.000.000.00	12.672.893.176.01	67
	Jasa Usaha	13.345.000.000.00	12.535.000.473.00	94
	Perizinan Tertentu	37.408.000.000.00	31.718.986.035.67	85
	<b>Jumlah</b>	<b>69.696.000.000.00</b>	<b>56.926.879.684.68</b>	<b>82</b>
2013	Jasa Umum	12.046.206.700.00	12.790.091.485.00	106
	Jasa Usaha	13.081.145.226.00	13.547.234.214.00	104
	Perizinan Tertentu	27.575.000.000.00	29.330.006.075.13	106

	<b>Jumlah</b>	<b>52.702.351.926.00</b>	<b>55.667.331.774.13</b>	<b>106</b>
2014	Jasa Umum	25.587.240.381.00	26.291.507.599.00	103
	Jasa Usaha	11.664.136.376.00	12.754.954.382.00	109
	Perizinan Tertentu	28.026.000.000.00	27.861.120.391.00	99
	<b>Jumlah</b>	<b>65.277.376.757.00</b>	<b>66.907.582.372.00</b>	<b>102</b>
2015	Jasa Umum	29.549.977.180.00	17.032.548.789.00	58
	Jasa Usaha	13.597.485.000.00	17.104.363.453.00	126
	Perizinan Tertentu	30.394.500.000.00	27.800.925.805.00	91
	<b>Jumlah</b>	<b>73.541.962.180.00</b>	<b>61.937.838.047.00</b>	<b>84</b>

Dari data diatas tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 – 2015 cukup efektif, karena mendekati angka 100%. Pada tahun 2011, 2013, dan 2014 tingkat efektifitasnya memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan yaitu diatas angka 100% tetapi pada tahun anggaran 2012 dan 2015 angka yang ditunjukkan hanya mencapai diatas angka 80%.

**Tabel 5.5 Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah**

Tahun	$X_t - X_{t-1}$	Pertumbuhan Penerimaan
-------	-----------------	---------------------------



	$X_t - 1$	an Pajak Daerah (Growth) %
2011	Rp.109.428.925.935.39	-
2012	$\frac{Rp.159.865.253.302.66 - Rp.109.428.925.935.39}{Rp.109.428.925.935.39}$	0,46
2013	$\frac{Rp.197.823.372.365.07 - Rp.159.865.253.302.66}{Rp.159.865.253.302.66}$	0,24
2014	$\frac{Rp.238.899.942.946.65 - Rp.197.823.372.365.07}{Rp.197.823.372.365.07}$	0,21
2015	$\frac{Rp.244.079.216.597.34 - Rp.238.899.942.946.65}{Rp.238.899.942.946.65}$	0,03

( Sumber : Data diolah : 2016 )

Dari data diatas tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah paling tinggi diperoleh pada tahun anggaran 2012 yaitu sebesar 0,46% sedangkan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,24%, tahun 2014 hanya sebesar 0,21% dan pada tahun 2015 hanya mencapai angka 0,03%.

**Tabel 5.6 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah**

Tahun	$\frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}}$	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (Growth) %
	$X_t - 1$	

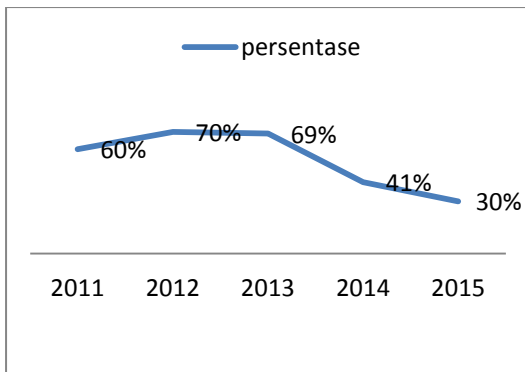
2011	Rp.48.807.626.632.27	-
2012	$\frac{Rp.56.926.879.684.68 - Rp.48.807.626.632.27}{Rp.48.807.626.632.27}$	0,17
2013	$\frac{Rp.55.667.331.774.13 - Rp.56.926.879.684.68}{Rp.56.926.879.684.68}$	-0,03
2014	$\frac{Rp.66.907.582.372 - Rp.55.667.331.774.13}{Rp.55.667.331.774.13}$	0,21
2015	$\frac{Rp.61.937.838.047 - Rp.66.907.582.372}{Rp.66.907.582.372}$	-0,08

Dari data tersebut, tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tidak menunjukkan hasil yang cukup memuaskan yaitu pada tahun anggaran 2012 pertumbuhan penerimaan hanya mencapai 0,17% sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan yaitu minus 0,03%, pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup positif yaitu sebesar 0,21% tetapi pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yaitu mencapai angka minus 0,08%.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

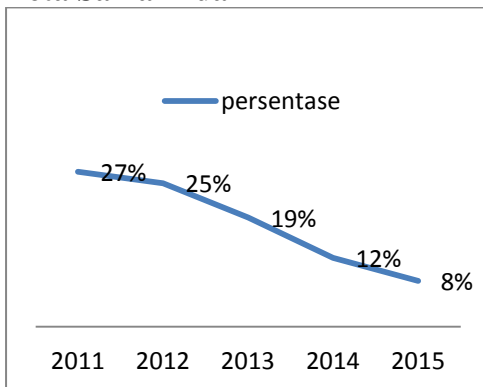
### Gambar 5.1 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda



( Sumber : Data diolah : 2016 )

Pada gambar diatas terlihat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Samarinda mengalami penurunan yang cukup signifikan, penurunan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak, kurangnya sarana dan prasarana untuk petugas penagih pajak.

**Gambar 5.2 Grafik Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda**

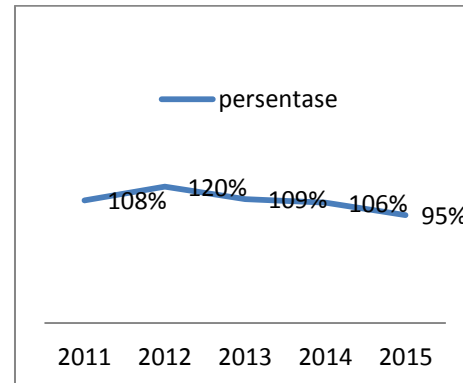


( Sumber : Data diolah, 2016 )

Pada gambar diatas terlihat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kota Samarinda mengalami penurunan yang terus menerus terjadi dan sangat signifikan, ini disebabkan karena target PAD yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan tingkat para pengguna jasa yang ada pada Kota Samarinda tidak mengalami pertumbuhan yang cukup banyak dan banyak perusahaan yang sudah tidak beroperasi

lagi sehingga mengakibatkan jumlah objek retribusi daerah mengalami penurunan.

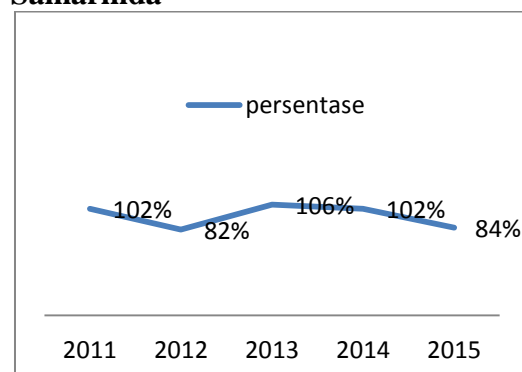
**Gambar 5.3 Grafik Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda**



( Sumber : Data diolah, 2016 )

Pada gambar diatas terlihat tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Samarinda sudah cukup efektif yang berada diatas 100% walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu mencapai 95% saja. Faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

**Gambar 5.4 Grafik Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda**



( Sumber : Data diolah, 2016 )

Pada gambar diatas terlihat tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah mengalami naik dan turun, adapun faktor

yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kota Samarinda antara lain adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada mengalami naik dan turun sehingga mempengaruhi para pengguna jasa yang ada pada Kota Samarinda.

### **Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan peningkatan yang paling tinggi hanya pada tahun 2012 sebesar 0,46% dan yang terendah di tahun 2015 hanya mencapai angka 0,03%.

### **Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah**

Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tidak menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tertinggi hanya terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,21% dan yang terendah pada tahun 2013 mencapai pada angka minus 0,03%.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda selama periode tahun 2011 – 2015 tidak memenuhi target minimal 75% dari target sehingga hipotesis ditolak.
2. Kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah Kota Samarinda selama periode 2011 – 2015 tidak memenuhi target minimal 75% dari target yang ditetapkan sehingga hipotesis ditolak.
3. Tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli

daerah Kota Samarinda selama periode 2011 – 2015 sangat efektif.

4. Tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah Kota Samarinda selama periode 2011 – 2015 sangat efektif.
5. Adanya kenaikan target PAD Kota Samarinda yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Samarinda yang mengalami penurunan yang cukup signifikan.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dalam mengelola pajak daerah sehingga selain dapat mengoptimalkan pengoperasian dan pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadi koordinasi dan juga dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menggali sumber – sumber pendapatan / penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperbaiki data dan sistem yang ada sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat tercapai dengan maksimal.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan mengambil objek yang berbeda sehingga dapat dibandingkan tingkat

keberhasilan otonomi daerah dengan Kota yang lain.

#### **Daftar Pustaka**

- Anonimous, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*, 2001, Jakarta : Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI.
- \_\_\_\_\_, *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, 2004, Jakarta : Lembaran Negara RI No. 125 Sekretaris Negara RI.
- \_\_\_\_\_, *Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Lembaran Negara RI No. 246 : Sekretaris Negara RI.
- \_\_\_\_\_, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Lembaran Negara RI No. 130 : Sekretaris Negara RI.
- Halim, Abdul., 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Mardiasmo., 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI
- Munir , Dasril, Henry Arys Djuanda., 2002 *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : YPAPI.

[www.samarindakota.go.id](http://www.samarindakota.go.id)

[www.dispenda.samarindakota.go.id](http://www.dispenda.samarindakota.go.id)